

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa kenakalan remaja, terutama di Kota Bekasi, merupakan fenomena yang berdampak negatif pada individu maupun tatanan sosial secara lebih luas. Kenakalan remaja tersebut berkaitan erat dengan ketidak patuhan terhadap norma-norma sosial dan dipengaruhi oleh kemajuan teknologi serta akses informasi yang mudah, yang dapat mengarah pada perilaku menyimpang. Fenomena ini seringkali terlihat dalam bentuk tawuran antar remaja dan kekerasan dalam hubungan sosial. Upaya penanganan terhadap kenakalan remaja dilakukan melalui kolaborasi antara berbagai instansi pemerintah dan masyarakat, seperti Kepolisian, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA), Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD), Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, serta peran aktif orang tua dan tokoh masyarakat. Kolaborasi ini dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi kenakalan remaja dan kekerasan di kalangan pelajar, dengan menggunakan teori kolaborasi dari Ansell dan Gash sebagai landasan dalam proses pengambilan keputusan kolektif.

Meskipun kolaborasi antara lembaga berjalan dengan baik, terdapat beberapa hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, seperti perbedaan pendapat antar stakeholder, keterbatasan anggaran dan sumber daya, serta kurangnya partisipasi keluarga dalam pengawasan dan pendampingan anak. Dalam hal ini, peran media sosial dan platform digital juga sangat penting untuk menyampaikan informasi dan program pencegahan yang dapat dijangkau oleh remaja di daerah yang sulit terjangkau. Pemerintah dan lembaga terkait perlu terus bekerja sama dan mengatasi tantangan yang ada untuk memastikan bahwa upaya pencegahan kenakalan remaja dapat berjalan efektif dan memberi dampak positif bagi masyarakat, khususnya remaja itu sendiri.

5.2 Saran

Untuk meningkatkan efektivitas kolaborasi dalam tata kelola pemerintahan adalah dengan memastikan komitmen penuh dari seluruh pihak yang terlibat sejak awal. Salah satu langkah penting adalah membangun dialog yang konstruktif dan saling memahami antar stakeholder, serta menyusun kesepakatan bersama yang jelas mengenai visi dan misi bersama. Penyelarasan tujuan juga perlu dilakukan dengan melibatkan semua pihak untuk memastikan kepentingan bersama diutamakan di atas kepentingan sektoral.

Selain itu, disarankan untuk membangun mekanisme koordinasi yang lebih jelas, seperti forum komunikasi rutin atau platform berbasis data yang transparan, guna memperkuat hubungan antar stakeholder. Penting pula untuk memberi ruang bagi negosiasi konstruktif agar setiap pihak dapat menyesuaikan prioritas mereka, tanpa mengabaikan tujuan utama kolaborasi. Dengan cara ini, hambatan akibat perbedaan pendapat dan tujuan antar instansi dapat diminimalkan, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mencapai hasil yang optimal.